

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Firman Ashadi

Prodi PAUD IKIP PGRI Jember

blueisfirman@gmail.com

Abstrak

The executive education is one of the sub system of management that need attention are the same as other sub management system, it is the key to educational success. Said, because given the current era of technology, facilities and infrastructure, the need for sufficient funds, does not guarantee success in education can be achieved, except with the help of the Human Resources (HR) is competent. Of that required for the proper management of human development. And in the development, media closest and very significant impact is through education. Educators give effect to learners, not just through the knowledge it conveys, but also by their attitudes, behavior, and speech. So with terpolanya educators, learners can be expected to be complete humans as aspired. Human resources becomes a dominant factor in an institution, not least in the field of education. Education requires qualified human resources to carry out its role in serving the educational needs of society. Therefore, it is important for the realization of human resource development efforts of the human resources quality education or quality. At institutions of Early Childhood Education (ECD) which means education before primary education which is an approach to development that is intended for children from birth up to the age of six years are accomplished by providing stimulation of education to help the growth and development of the physical and spiritual for children has the readiness to enter further education, which was held in formal, non-formal and informal. With the quality of human resources in early childhood education institutions, is expected to create an atmosphere of positive educational aims for the utilization, development, research, human resources to be managed effectively and efficiently.

Kata Kunci: *Development, Human Resources, ECD (Early Childhood Education)*

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, sehingga untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan pendidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari salah satu sumber daya manusia Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang akan mencetak insan yang cerdas dan bermartabat. Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, peranan pendidikan sangat penting. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, diharapkan peran SDM khususnya pada lingkup lembaga pendidikan anak usia dini.

Pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, mensosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Melalui perannya tersebut, pendidikan akan menghasilkan

masyarakat pembelajar yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan mengkomunikasikannya. Sedangkan sebagai agen perubahan, pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial.

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan, bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga negara suatu bangsa khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yg memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa pendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya.

PEMBAHASAN

Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konstelasi tulisan ini, pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pengembangan. Untuk itu, maka pendidikan memerlukan SDM yang kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan dan SDM yang kompeten tersebut dicapai melalui proses pengembangan. Dengan demikian, SDM menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait secara fungsional bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Komponen SDM setidaknya menjadi komponen yang paling strategis, karena dengan SDM berkualitas dapat mendayagunakan komponen lainnya, sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pendidikan. Dimana SDM berkualitas dapat dicapai dengan pengembangan SDM.

Selain itu, Hasibuan (2007:69) mengemukakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya, SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan, 2007:243). Kemudian dijelaskan bahwa daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan adalah diperoleh dari usaha pendidikan. Daya fisik adalah kekuatan dan ketahanan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang diembannya. Dengan demikian, SDM bidang pendidikan adalah kompetensi fungsional yang dimiliki tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

A. Pengembangan SDM melalui Pendidikan

Pengembangan SDM yang membawa misi sebagaimana disebutkan di atas difokuskan pada peningkatan ketahanan dan kompetensi setiap individu yang terlibat atau akan terlibat dalam proses pembangunan. Peningkatan ketahanan dan kompetensi ini di antaranya dilaksanakan melalui pendidikan. Bila dikaitkan dengan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, pendidikan juga merupakan upaya meningkatkan derajat kompetensi dengan

tujuan agar pesertanya adaptable terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan seharusnya juga memberi bekal-bekal kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan (Boediono, 1992). Program semacam ini harus dilaksanakan dengan disesuaikan dengan keperluan dan usaha yang mengarah kepada antisipasi berbagai perubahan yang terjadi, baik di masa kini maupun yang akan datang (Han, 1994; Dertouzas, Lester, dan Solow, 1989). Sebagaimana dijelaskan di atas, pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses melakukan perubahan, dalam rangka perbaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kesejahteraan terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat, baik material maupun mental dan spiritual. Adapun kualitas SDM terkait dengan derajat kemampuan, termasuk kreatifitas, dan moralitas pelaku-pelaku pembangunan. Atas dasar ini, proses perubahan yang diupayakan melalui pembangunan seharusnya menjangkau perbaikan semua sektor secara menyeluruh dan berimbang, pada satu sisi, dan pada sisi lain merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM. Perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah fokus dari pembangunan sektor ekonomi, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan material, baik kebutuhan primer, sekunder, tertier maupun kuartier.

Pemenuhan kebutuhan ini seharusnya seimbang dengan pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual. Bebas dari rasa takut, adanya rasa aman, dihargai harkat dan martabatnya, dilindungi kebebasan dan hak-haknya, serta tersedianya kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan potensi diri adalah bentuk-bentuk kebutuhan mental yang seharusnya diperbaiki kondisinya melalui pembangunan. Adapun pemenuhan kebutuhan spiritual terkait dengan kebebasan dan ketersediaan prasarana, sarana dan kesempatan untuk mempelajari, mendalami dan menjalankan ajaran agama yang dianut, sehingga komunikasi dengan Sang Pencipta dapat terpelihara. Pada sisi peningkatan kualitas SDM, pembangunan diarahkan untuk menjadikan rakyat negeri ini kreatif, menguasai serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), dan memiliki moralitas. Kreatifitas diperlukan untuk bisa bertahan hidup dan tidak rentan

dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dengan kreatifitas, seseorang menjadi dinamis dan bisa menemukan jalan keluar yang positif ketika menghadapi kesulitan atau masalah.

Penguasaan dan kemampuan mengembangkan IPTEKS sangat dibutuhkan untuk peningkatan taraf hidup, dan agar bangsa ini bisa disandingkan dan ditandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ini mengingatkan, globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak bisa dihindari dan berdampak pada terjadinya persaingan yang ketat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Untuk bisa memasuki pergaulan dalam kehidupan global (persandingan dengan masyarakat global) maupun untuk meraih keberhasilan dalam berbagai kesempatan yang tersedia (pertandingan dalam kehidupan global) diperlukan penguasaan dan kemampuan mengembangkan IPTEKS. Adapun moralitas sangat diperlukan agar dalam menjalani kehidupannya perilaku bangsa ini dikendalikan oleh nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat nasional dan universal. Karena nilai-nilai ini berkaitan dengan batas-batas antara baik dan tidak baik, benar dan tidak benar, serta antara yang menjadi haknya dan bukan haknya, maka tingginya moralitas dapat meningkatkan keterpercayaan dan keandalan individu dan masyarakat, baik di mata bangsanya sendiri maupun dalam pergaulan global.

Jadi, kualitas SDM bukan hanya ditentukan oleh kemampuan dan kreativitasnya saja tetapi juga oleh derajat moralitasnya. Selain berkaitan dengan sistem masyarakat secara umum, kualitas SDM mempunyai keterkaitan erat dengan kualitas pendidikan sekolah. Karena SDM berkualitas adalah keluaran sistem pendidikan, proses pendidikan harusnya menjadikan kreativitas, penguasaan dan kemampuan mengembangkan IPTEKS, serta moralitas sebagai acuan dasar. Unsur penguasaan dan kemampuan mengembangkan IPTEKS bisa dicapai melalui proses pembelajaran sejumlah mata ajaran secara berjenjang. Unsur kreativitas bisa dirajut dalam sebagian dari mata ajaran tertentu, misalnya matematika, IPA dan IPS, namun dengan penerapan model pembelajaran yang kondusif, seperti keterampilan proses (melalui penemuan).

B. Kenapa harus SDM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peran Guru Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Belajar adalah suatu proses perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan.

Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi dapat diartikan proses belajar adalah sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Guru adalah pihak utama yang langsung berhubungan dengan anak dalam upaya proses pembelajaran, peran guru itu tidak terlepas dari keberadaan kurikulum. Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan guru. Sebab, sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam "mengukir" peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas.

Karena itu, sikap profesionalisme dalam dunia pendidikan (sekolah), tidak sekadar dinilai formalitas tetapi harus fungsional dan menjadi prinsip dasar yang melandasi aksi operasionalnya. Tuntutan demikian ini wajar karena dalam dunia modern, khususnya dalam rangka persaingan global, memerlukan sumber daya manusia yang bermutu dan selalu melakukan improvisasi diri secara terus menerus. Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga pendidik atau guru merupakan cetak biru (*blueprint*) bagi penyelenggaraan pendidikan.

Seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. Di sinilah letak pentingnya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu. Pendidikan bagi anak usia dini juga tidak lepas dari peran pendidik atau guru sebab pada anak usia dini merupakan masa keemasan (*golden age*) yang sangat mendasar. Di Indonesia, dengan hadirnya Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka pendidikan anak usia dini mendapat perhatian yang serius. Di dalam aturan tersebut juga tercantum standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan bagi AUD.

C. Kompetensi Pendidik PAUD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 40 Ayat 2, dinyatakan bahwa kewajiban pendidik adalah : (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,

kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, maka pendidik harus memiliki sejumlah kompetensi. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini meliputi (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan Bab IV) :

1. Kompetensi Pedagogis, mencakup kemampuan untuk dapat :

- a) Memahami karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik,
- b) Menguasai konsep dan prinsip pendidikan,
- c) Menguasai konsep, prinsip dan prosedur pengembangan kurikulum,
- d) Menguasai teori, prinsip, dan strategi pembelajaran
- e) Menciptakan situasi pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian,
- f) Menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan strategi bimbingan belajar peserta didik, serta
- g) Menguasai media pembelajaran termasuk teknologi komunikasi,
- h) Menguasai prinsip, alat, dan prosedur penilaian proses dan hasil belajar.

2. Kompetensi Kepribadian, mencakup kemampuan untuk dapat :

- a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, mantap, stabil, dewasa, berwibawa serta arif dan bijaksana,
- b) Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar.
- c) Memiliki jiwa, sikap, dan perilaku demokratis; serta
- d) Memiliki sikap dan komitmen terhadap profesi serta menjunjung kode etik pendidik.

3. Kompetensi Sosial, mencakup kemampuan untuk dapat :

- a) Bersikap terbuka, obyektif, dan tidak diskriminatif,
- b) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan santun dengan peserta didik,
- c) Berkomunikasi dan bergaul secara kelogial dan santun dengan sesama tutor dan tenaga kependidikan,
- d) Berkomunikasi secara empatik dan santun dengan orang tua/wali peserta didik serta masyarakat sekitar,
- e) Beradaptasi dengan kondisi sosial setempat,
- f) Bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, sesama tutor dan tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional, mencakup kemampuan untuk dapat :

- a. Menguasai substansi aspek-aspek perkembangan anak,
- b. Menguasai konsep dan teori perkembangan anak yang menaungi bidang-bidang pengembangan,
- c. Mengintegrasikan berbagai bidang pengembangan,
- d. Mengaitkan bidang pengembangan dengan kehidupan sehari-hari; serta
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri dan profesi.

5. Manajemen Strategi Pendidikan Anak Usia Dini

Suatu peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan anak usia dini tergantung pada sumber daya manusia. Pendidikan anak usia dini ini harus menjadi prioritas utama dengan cara merancang dan menyusunnya secara matang supaya pendidikan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Kepengurusan akan rencana tersebut disebut sebagai kegiatan manajemen. Istilah manajemen pada PAUD berarti adanya pengelolaan, pengaturan atau penataan pada lembaga PAUD tersebut. Dalam manajemen harus dilakukan secara sistematis yang mana didalamnya terdiri dari adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan tentunya pengawasan. Keempat hal tersebut merupakan kunci bagaimana PAUD nantinya dijalankan. Adanya manajemen akan membuat pelaksanaan pendidikan lebih terarah dan juga

diharapkan pendidikan anak usia dini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam manajemen pendidikan anak usia dini, terdapat model manajemen yang digunakan, yaitu:

- a. Pengelolaan PAUD mengacu pada terlalu seringnya dalam bidang seni daripada ilmunya.
- b. Penggunaan manajemen “gotong royong”, maksudnya adalah bahwa semua sektor (dalam hal ini orang) melakukan semua pekerjaan. Tidak hanya pembagian tugas yang jelas.
- c. Manajemen dengan menggunakan gaya tukang cukur, maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan semua pekerjaan, mulai dari membuka kios, menyapu, memotong rambut, menutup kios, hingga manajemen keuangan.
- d. Budaya “sungkan” atau segan pada organisasi, maksudnya adalah bahwa segan jika menegur kesalahan teman dan marah jika ditegur teman kerjanya.

Manajemen pendidikan memiliki arti mengelola pendidikan. Mengelola suatu pendidikan bukanlah mengelola sebuah tempat usaha barang, melainkan mengelola sumber daya manusia yang memiliki keunikan-keunikan masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan cara yang tepat dalam mengatur segala permasalahan manajemen pendidikan anak usia dini (PAUD). Oleh karena itu harus mencari model yang paling tepat agar PAUD bisa berkembang dengan baik. Dalam manajemen suatu lembaga pendidikan terdapat empat komponen yang menjadi titik fokus perhatian, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan
Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaannya suatu pendidikan. Oleh karena itu harus ada ketentuan dalam perekrutan tenaga-tenaga tersebut dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang sekiranya sesuai dengan kemampuan masing-masing orang.

- b. Pengelolaan peserta didik.
Peserta didik adalah objek dari suatu pendidikan, sehingga perlu dipikirkan mau dibawa kemana peserta didik, mau diajar yang seperti apa dan sebagainya.
- c. Manajemen sarana prasarana.
Sarana dan prasarana merupakan seperangkat perlengkapan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD.
- d. Manajemen keuangan
Keuangan berarti ada kegiatan pembiayaan. Dalam pembiayaan meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD yang dikelola secara baik dan transparan.

Ada 3 jenis biaya yaitu Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; Biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung; Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

6. PAUD saat ini

Namun di beberapa PAUD, setelah berjalan dengan tidak adanya penarikan biaya, dikarenakan biaya operasional biasanya merupakan sumbangan dari berbagai pihak di masyarakat, ternyata mengalami beberapa kendala. Misalnya sumbangan yang didapat hanya dapat memenuhi bahan belajar murid, namun hal lain seperti honor para pendidik tidak dapat terpenuhi. Padahal, para pengajar PAUD seringkali memerlukan uang transport untuk menjangkau PAUD yang dibina. Selain itu, para orangtua murid juga meminta adanya rekreasi bersama atau pemakaian baju seragam. Dan untuk kebutuhan seperti ini, PAUD

seringkali tidak memiliki dana. Kemudian, beberapa PAUD akhirnya menarik iuran sekolah. Tentunya iuran ini tidak bisa besar jumlahnya, karena para murid PAUD berasal dari keluarga miskin hal ini sama sekali tidak berjalan bahkan muridnya banyak yang berhenti. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terutama Direktorat Jendral Pendidikan PAUD, sebetulnya sudah menyediakan dana untuk operasional PAUD. Namun dana yang ada ternyata tidak mencukupi kebutuhan operasional seluruh PAUD. Akhirnya dilakukan secara bergilir, pengguliran dana tersebut, dengan cara mengajukan proposal. Dari masalah pembiayaan yang terjadi di PAUD tersebut, apabila berdasarkan DUHAM Pasal 26 tadi, maka akan terjadi kontradiksi. Pemenuhan hak pendidikan seharusnya gratis, namun kenyataannya belum bisa gratis. Bahwa untuk memenuhi hak pendidikan secara penuh, ternyata masih diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Sebetulnya, masalah seperti itu tidak harus terjadi jika pemerintah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak pendidikan dengan maksimal.

Pertama, pemerintah seharusnya memasukkan siswa PAUD berusia dibawah 7 tahun sebagai suatu pendidikan dasar, yang harus dipenuhi pada warganegaranya, sehingga PAUD menjadi salah satu prioritas pemenuhan pendidikan dasar sesuai UU yang berlaku. **Kedua**, anggaran pendidikan tersendiri, tidak disatukan dengan anggaran kesehatan dan jumlahnya seharusnya terbesar dari pengeluaran negara lainnya didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). **Ketiga**, dialokasikannya anggaran pendidikan yang terbesar jumlahnya dari pengeluaran daerah lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). **Keempat**, pengumpulan dana pajak atau retribusi dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah PAUD, yang dilakukan oleh pemerintah setempat misalnya tiap kelurahan atau desa, yang dipergunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan dasar, baik PAUD, TK, TPA, SD, MI sampai tingkat SMP. Dan yang terakhir, pengumpulan dana swadaya masyarakat, baik dilakukan oleh LSM atau masyarakat sendiri, terutama di tujukan untuk pemenuhan pendidikan bagi warganya sendiri sama sekali tidak berjalan

7. Guru PAUD dewasa ini

Terkait dengan kualifikasi pendidikan guru PAUD tergolong rendah. Berdasarkan

data, guru TK yang berkualifikasi S1 baru sekitar 20 persen. Sedangkan guru PAUD nonformal yang berkualifikasi SMA ke atas baru 75 persen. Bahkan masih terdapat guru PAUD yang masih berkualifikasi SMP bahkan SD. Menyikapi hal tersebut Dirjen PAUDNI menargetkan pada tahun 2020 seluruh guru TK harus S1, dan tahun 2016 semua guru PAUD sudah mendapatkan diklat dasar, ungkap anggota *World Conference on the Gifted and Talented Children (WCGTC)* (@dr1) Fenomena rendahnya kualitas guru PAUD mungkin ada benarnya terutama di daerah-daerah terpencil, jika dilihat dari konteks tertentu, yaitu (a) bahwa masih terdapat kesenjangan antara kualitas dan kuantitas pengelola PAUD sendiri dan (b) bahwa PAUD belum sepenuhnya memainkan peran pendidikan karena keterbatasan dalam berbagai bidang ,ekonomi,dan sosial. Kedua hal di atas membawa beberapa kesimpulan bahwa PAUD di Indonesia adalah tergolong “mayoritas perkembangannya sangat pesat minoritas SDM dari segipinansial” (Prop.W.F.Wertthim dari Belanda) atau menurut Donald Emmerson “minoritas aktif dalam mayoritas bilanagn” dan kesimpulan-kesimpulan senada.

Terlepas dari setuju atau tidaknya terdapat kesimpulan di atas ,namun agaknya kehidupan PAUD di Indonesia secara umum diliputi fenomena jalan ditempat (terutama daerah terpencil dibandingkan dengan PAUD di kota TK/ RA) seperti tampak pada kualitas kehidupan sosial, ekonomi, poltik, kualitas media, dan kualitas pendidik yang dimiliki PAUD itu sendiri. Pada tataran teoritis, fenomena ketinggalan tenaga pendidik PAUD di daerah merupakan akibat ketidak mampuan mereka untuk mengaktualisasikan garis besar pembelajaran waktu berhadapan dengan kenyataan di kelas,maka timbul kesenjangan.Hal demikian berpangkal pada lemahnya pemahaman dan penghayatan pembelajaran, karena minimnya pendidikan dan latihan yang diadakan oleh pemerintah untuk guru PAUD.

Pada tataran empiris, fenomena ketinggalan tersebut merupakan produk proses sejarah berdirinya PUD yang baru beberapa tahun sudah menjamur secara

kuantitas tidak dibarengi kualitas sumberdaya pendidiknya, kesejahteraan pendidik, dan tempat belajar ada yang di garasi, emper rumah atau menyatu dengan rumah dan proses pembelajaran asal-asalan. Terdapat jalinan dialektika antara ke tiga faktor di atas, yaitu faktor tenaga pendidik sebagian besar hanya lulusan SLTA, kesejahteraan yang mengandalkan minta iuran ini merupakan dilematik karena orang tua siswa PAUD tergolong ekonomi lemah, tempat belajar kurang presentatif, secara historis bawa rendahnya sumberdaya merupakan sebab rendahnya kualitas.

Sebagai akibat, sumberdaya manusia dikalangan PAUD mengalami tenaga kurang profesional dalam berbagai pengetahuan, seharusnya yang berhubungan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diperlukan sumberdaya manusia yang profesional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkualitas. Untuk menangani permasalahan ini perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah pusat, dan daerah harus bisa menghilangkan dikotomi paud formal dan non formal, pelatihan-pelatihan untuk pendidik PAUD sampai ke daerah-daerah harus ditingkatkan, dan dana operasional penyelenggaraan/kesejahteraan pendidik PAUD secara rutin semua kegiatan ini sarana perasaranan PAUD masih kurang.

DAFTAR RUJUKAN

Hasibuan, Malayu, S. P. (2007) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia

Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

http://www.kompasiana.com/denoklelyanac/ahyani/manajemen-strategi-pendidikan-anak-usia-dini_54f71cbb333114b0d8b48fe

<http://kofiahalfaqor.blogspot.co.id/2014/05/pendidikan-anak-usia-dini-dan-malah.html>